

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim dan Evi Maria. *Problematika Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara & Daerah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020);
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006);
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara* (Jakarta: Gramedia, 1986);
- Darumurti, Krishna Djaya. *Diskresi Kajian Teori Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016);
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017);
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013);
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016);
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004);
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012);

Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2002);

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990);

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999);

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006);

Sukamdinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012);

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Bandung: Rajawali Pers, 2008)

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers, 2018);

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

JURNAL

Ansori, Lutfil. *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan, Pemerintahan*. Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 1. Juni 2015.

Elviandri, dkk. *"Quo Vadis negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2. Juni 2019;

Firdaus, Fahmi Ramadhan dan Anna Erliyana. *Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020*, PALAR (*Pakuan Law Review*), Volume 06, Nomor 02. 2020;

Gunawan, Siti Rachmawati. *Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Volume 4, Nomor 4, 2020;

Juliani, Henny. *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*. Administrative Law & Governance Journal Volume 3 Issue 2, Juni 2020;

_____, *Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19*,

- Administrative Law & Governance Journal Volume 3 Issue 4,
November 2020;
- Mustamu, Julista. *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2. April-Juni 2011;
- Nurhalimah, Siti, *Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, Nomor 1. 2020;
- Prananingtyas, Paramita. *Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Pencegahan Krisis Sistem Keuangan Di Indonesia*. Diponegoro Private Law Review, Volume 1, Nomor 1. 2020;
- Solechan. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3. Agustus 2019;
- Umar, Kusnadi, *Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara*, El-Iqtishady, Volume 2 Nomor 1. Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVIII/2020.

LAPORAN DAN BUKU AJAR

Soeriaatmadja, Arifin. *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*, Desember 2010;

Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia.

INTERNET

Humas Setkab, *5 Poin Penting Presiden soal Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan*, (<https://setkab.go.id/5-poin-penting-presiden-soal-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan/>, diakses pada 12 Oktober 2020);

CNN Indonesia, Pengamat: Perppu “Corona” Berpotensi Inkonstitusional dan Ada Celah Korupsi, (<https://www.youtube.com/watch?v=joUKwoudx1A&t=287s>, diakses pada 7 Maret 2021 pukul 22.30);

Kementerian Keuangan, *Kewenangan KSSK Bertambah untuk Jaga Stabilitas Sistem Keuangan Selama Covid-19*, (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kewenangan-kssk-bertambah-untuk-jaga-stabilitas-sistem-keuangan-selama-covid-19/>) diakses pada 11 Maret 2021 pukul 21.00);

Kuliah Umum HTN, “*Perkembangan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*”, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), 30 April 2020, (<https://www.youtube.com/watch?v=ZlNpVZy84CM>), diakses pada 21 April 2021 pukul 23.00).